

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsah, N. dan T. P. (2017). *Teori dan Praktek Kewenangan* (Purwowibowo (ed.); Cetakan Pe). Pandiva Buku.
- Anton Hutomo Sugiarto, dkk. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politik Pada Pemilu 2019. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/http://ojs.uniyos.ac.id/index.php/jp>
- Aras Firdaus. (2020). Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. *Justiqa*, 2(1), 1689–1699.
- Ardipandanto, A. (2014). Kampanye Pemilu 2014 dan Konglomerasi Media Massa. *Info Singkat*, VI(06), 17–20. <https://doi.org/www.dpr.go.id>
- Ardipandanto, A. (2019). *Money Politics : Catatan Kritis Pelaksanaan Pilkada 2018*.
- Bambang Sasmito, S. & G. P. R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Calon Anggota DPRD kota Balikpapan Yang Melaksanakan Kampanye Dengan Menjanjikan atau Memberikan Uang dan Imbalan Lain pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Lex Suprema*, 1(II), 1–19.
- Chunul Mar'iyah, R. S. (2013). *Belajar Dari Politik Lokal* (Seri II). UI-Press.
- Fahmi, K. (2016). *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu dan Pilkada di Era Reformasi* (Cet. 1). Rajawali Pers.
- Febrianto, I. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 110–115. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>
- Haryati, D. (2012). Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 135–146. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.135-146>
- HR, R. (2011). *Hukum Administrasi Negara* (Cetakan ke). Rajawali Pers.
- Makhsid, W. (2015). Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2).
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Tarmizi (ed.); Cet. 1). Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2018). *Teori Hukum* (Edisi Revi). Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, D. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia* (A. Gunarsa (ed.); Cetakan Ke). Refika Aditama.
- Mulyadi, M. (2019). Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019. *Info Singkat*, IX(09). https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf
- Oky Rompana dkk. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Yang Tidak Memberitahukan Kegiatan Kampanye Kepada Polri di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Lex Suprema*, 1(II), 1–17.

- Parlindungan, A. (2019). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 335–351. <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.108>
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Kencana.
- Prayitno, S. (2019). *Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019*. 2019(April), 1–18.
- Sanur, D. (2018). Tantangan Dan Strategi Parpol Dalam Pilkada Serentak 2018. *Info Singkat*, 10(02), 25–30.
- Sejati, S. B., & Sendhikasari, D. (2019). Jaminan Pemerintah Terhadap Anggota KPPS Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Actual Dan Strategis*, XI(9).
- Sinaga, D. (2018). *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Cetakan ke). Nusa Media.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). UI-Press.
- Topo Santoso, B. (2019). *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (Tarmizi (ed.); Cetakan Pe). Sinar Grafika.
- Widayati, L. S. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu*. 11(7), 1–6.
- Wiyanto, R. (2014). *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD* (R. M. Maju (ed.); Cetakan Ke). Mandar Maju.
- Zainal Arifin Hoesein, A. (2017). *Penerapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Cet. 1). Rajawali Pers.